

**PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK UNTUK MENINGKATKAN SENSIBILITAS
SOSIAL WARGANEGARA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBANGUNAN
KARAKTER DAN BANGSA¹**

Oleh: Rusnaini²

Abstract

Konflik merupakan masalah yang selalu muncul dalam interaksi seorang individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Konflik juga seringkali tidak bisa dihindari, namun harus bisa diatasi (dikelola). Berhubung sikap keterampilan mengelola konflik tersebut tidak datang dengan sendirinya, maka disinilah pendidikan harus mampu menjalankan misi utamanya, yakni membelajarkan pendidikan resolusi konflik, yaitu suatu istilah umum yang mencakup negosiasi, mediasi, kelompok mediasi, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Pendidikan resolusi ini diyakini dapat meningkatkan sensibilitas sosial dan menjadi salah satu alternatif pembangunan karakter dan bangsa.

Keywords: *Conflict resolution education; social sensibility; nation and character building*

A.PENDAHULUAN

Thomas Lickona (1992) mengemukakan sepuluh tanda dari perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa yaitu: “meningkatnya kekerasan, ketidakjujuran, rasa tidak hormat kepada orangtua, guru dan figur pemimpin, pengaruh *peer group* terhadap tindakan kekerasan, meningkatnya kecurigaan dan kebencian, penggunaan kata-kata yang buruk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggungjawab warga negara, meningkatnya perilaku merusak diri dan mengaburnya pedoman moral.” Sepuluh tanda dari perilaku manusia yang dikemukakan Lickona ini merupakan “perilaku yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam interaksi sosial individu ataupun kelompok.” Perilaku buruk ini sering kali memicu terjadinya konflik sosial, yang seringkali berujung pada kekerasan atau perilaku destruktif, misalnya pengrusakan harta benda milik pribadi seperti rumah, dan kendaraan ataupun pengrusakan fasilitas umum, seperti perkantoran, pertokoan, dan sebagainya. Fenomena kekerasan ini marak terjadi di kalangan masyarakat, baik di tingkat

¹. Artikel non penelitian.

². Dosen pada Program Studi PPkn, FKIP-Universitas Sebelas Maret Surakarta.

masyarakat umum maupun di tingkat kaum terpelajar. Sebagai contoh, perkelahian antar pelajar atau mahasiswa yang kemudian merusak fasilitas umum di kampus dan di jalan raya, perkelahian antar penonton sepak bola yang merusak stadion dan fasilitas umum lainnya di kota. Perkelahian antar desa yang meminta korban jiwa dan harta benda, dan banyak lagi contoh konflik yang bersifat destruktif terjadi di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Konflik tidak hanya terjadi di tingkat ‘*grass root*’, melainkan juga terjadi di tingkat parlemen. Selanjutnya dengan dalih ‘demokrasi’ dan ‘keterbukaan’, konflik yang terjadi pada sidang-sidang “panitia khusus’ atau ‘pansus’ Dewan Perwakilan Rakyat ini dipertontonkan melalui media massa TV sebagaimana dapat kita saksikan dalam sidang-sidang kasus Bank Century tahun lalu. Dengan mengatasnamakan demokrasi, konflik dalam parlemen ini cukup memprihatinkan jika dilihat dari ‘fatsoen’ politik ataupun azas ‘kepatutan’. Hal ini sangat ironis mengingat para petinggi negara selalu mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jika di tingkat parlemen konflik belum sampai meminta korban ‘jiwa dan harta benda’, maka di tingkat ‘*grass root*’ yang terjadi adalah sebaliknya.

Dalam dekade terakhir, seringkali terjadi konflik sosial berupa perkelahian atau ‘tawuran’ antar pelajar di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Perkelahian seperti ini juga terjadi di antara mahasiswa di kampus-kampus. Di beberapa sekolah, sering terjadi konflik antar pelajar yang di negara-negara barat lebih dikenal dengan istilah “*bullying*”. *Bullying* merupakan perilaku buruk seperti tindakan melukai, melakukan kekerasan secara fisik (pemukulan, tendangan, mendorong, mencekik dll), secara verbal seperti memanggil dengan nama buruk, mengancam, mengolok-olok, menyebarkan isu buruk atau tindakan lain seperti melakukan gerakan tubuh yang melecehkan atau dengan sengaja mengucilkan korban dari kelompoknya. Tindakan mengucilkan ini disebut “*indirect bullying*”, sedangkan yang dilakukan secara verbal ataupun fisik disebut sebagai “*direct bullying*” (Dessynataliani, 2006).

Konflik yang menimbulkan kekerasan antar pelajar merupakan suatu masalah serius yang menjadi perhatian semua pihak, yaitu: guru, orang tua dan siswa (pelaku maupun korban) dan pihak institusi pemerintah yang terkait dengan persoalan kekerasan seperti ini. Hal ini menjadi masalah serius karena kekerasan antar pelajar ini sangat merugikan pihak korban dan juga pelaku. Oleh karena itu, masalah tindak kekerasan antar pelajar ini menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari orang tua, pihak sekolah, lembaga pemerintah, dan juga

lembaga internasional. Sebagai contoh, pada tahun 2001 lalu lembaga internasional UNICEF dan UNESCO telah melakukan pelatihan anti kekerasan dengan tema “Membangun Budaya Damai dan Penyelesaian Konflik tanpa Kekerasan” yang diikuti oleh siswa, orang tua siswa dan para guru, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa dan LSM. Pernah juga dalam penyelenggaraan acara sejenis melibatkan pejabat dari Departemen Pendidikan Nasional sebagai pesertanya. Tujuan yang ingin dicapai dari training atau pelatihan ini adalah “menghasilkan pelatih dan fasilitator (guru, orangtua dan siswa) yang memiliki kepedulian terhadap sebab dan akibat dari kekerasan, memiliki pengetahuan tentang HAM, memiliki ketrampilan mengelola kelompok dan ketrampilan melakukan pendidikan partisipatif tentang perdamaian.” Pemerintah juga telah menetapkan berbagai UU dan peraturan dalam mengatur anak yang terlibat tindak kekerasan ataupun kriminal. Departemen pendidikan nasional juga telah mengeluarkan keputusan menteri tentang jumlah jam belajar efektif untuk menghindari pemanfaatan waktu luang oleh siswa untuk kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat dan dapat memicu perkelahian. Beberapa sekolah juga telah memberikan peringatan tegas dan sanksi bagi siswa yang terlibat perkelahian massal dari mulai memberi nasihat, penyuluhan sampai sanksi yang lebih keras seperti dikeluarkan dari sekolah, namun tindakan ini nampaknya masih belum mampu mengurangi konflik (Kompas, 2009; Sajad, 2009).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, kasus-kasus kekerasan yang menonjol di dalam masyarakat dan di dunia pendidikan memerlukan solusi untuk mengatasinya. Kekerasan yang marak terjadi menunjukkan pentingnya untuk melatih dan membangun sensibilitas sosial agar setiap warganegara memiliki kontribusi yang signifikan bagi pembangunan karakter bangsa dan negara. Untuk itu, pendidikan resolusi konflik dapat merupakan alternatif pendidikan untuk membangun karakter bangsa. Sejalan dengan hal ini, Lynch (sebagaimana dikutip Maftuh, 2008:96) menyarankan jika sekolah ingin menjadi efektif sebagai pendidikan untuk warganegara yang berwawasan global, diantaranya adalah kegiatan sekolah mesti memasukkan penekanan pada karakter, khususnya yang menekankan pada pendidikan resolusi konflik. Lickona (1992) mengatakan bahwa “pendidikan karakter amat diperlukan agar manusia bukan hanya mengetahui kebajikan (*knowing the good*) tetapi juga merasakan (*feeling the good*), mencintai (*loving the good*), menginginkan (*desiring the good*) dan mengerjakan (*acting the good*) kebajikan.” Dengan pendidikan karakter, seorang anak akan memiliki memiliki sensibilitas sosial yang sangat diperlukan dalam relasi sosialnya dengan orang lain di sekolah, di tempat bekerja, ataupun di dalam lingkungan masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, bagaimana melatih dan membangun sensitivitas sosial agar setiap warganegara memiliki kontribusi yang signifikan bagi pembangunan karakter bangsa dan negara?

Selanjutnya makalah ini akan mendiskusikan perspektif pendidikan resolusi konflik untuk pembangunan karakter bangsa dan negara dengan membagi bahasan menjadi tiga bagian, yakni; 1) Memahami fenomena konflik sosial, 2) Pendekatan pendidikan resolusi konflik, 3) Metode pendidikan resolusi konflik; 4) Kedudukan pendidikan resolusi konflik dalam sistem pendidikan; dan 5) Model pendidikan resolusi konflik berbasis sekolah

B. MEMAHAMI FENOMENA KONFLIK SOSIAL

Kondisi sosial yang memicu timbulnya konflik tidaklah selalu sama, selain itu tidak selalu bentuk dan sifatnya sama (misal jenisnya ada konflik individu atau kelompok, konflik terpendam atau terbuka dsb). Jadi memang ada variasi dalam penyebab terjadinya, maupun langkah penyelesaiannya. Selanjutnya dalam persoalan konflik ini perlu diperhatikan konteks struktur dan fungsi dalam kehidupan sosial yang bersangkutan. Tipe struktur dan fungsi kehidupan sosial tertentu sebagai suatu entitas akan berpengaruh terhadap konflik yang terjadi di situ. Peter M. Blau (1967) menyatakan bahwa “struktur sosial adalah penyebaran secara kuantitatif warga komunitas di dalam berbagai posisi sosial yang berbeda yang mempunyai hubungan diantara mereka.” Karakteristik pokok dari struktur yaitu adanya berbagai tingkat ketaksamaan atau keberagaman antarbagian dan konsolidasi yang timbul dalam kehidupan bersama, sehingga mempunyai derajat hubungan antar bagian tersebut atau interaksi antara para anggota yang di dalamnya selalu diwarnai dengan kerjasama (*cooperative*), persaingan (*competition*) dan konflik atau pertikaian (*conflict*). Menurut Bodine & Crawford (1996), reaksi atau respon terhadap konflik dikategorikan menjadi tiga kelompok dasar: respon *ringan*, *sukar/keras*, dan *bersifat prinsip*.

Reaksi-reaksi ringan seperti penangkalan, akomodasi dan kesepakatan biasanya muncul diantara individu-individu dalam hubungan pertemanan atau keinginan untuk merasa nyaman kepada yang lainnya karena masih ingin berhubungan dimasa yang akan datang.

Reaksi-reaksi sukar atau keras terhadap konflik muncul diantara individu-individu yang bertentangan dan bertujuan untuk menang. Reaksi sukar atau keras terhadap konflik dikarakteristikan oleh konfrontasi yang melibatkan kekuatan, ancaman, agresi dan

kemarahan. Juru runding yang keras meminta pengakuan sebagai syarat suatu hubungan dan mendesak posisi mereka.

Reaksi-reaksi berprinsip muncul diantara individu-individu yang memandang bahwa mereka sendiri lah yang menjadi pemecah masalah dan tujuannya adalah hasil kebijakan yang dicapai secara efisien dan berdasarkan mufakat. Juru runding yang memakai prinsip sebagai suatu reaksi konflik memahami bahwa komunikasi adalah interaksi kerjasama yang mendasar, dan mereka memahami bahwa berpartisipasi dalam pengembangan pemahaman yang mudah diterima atau lumrah.

Bodine & Crawford (1996) juga mengemukakan tiga tipe reaksi terhadap konflik menghasilkan hasil yang berbeda pula. Reaksi-reaksi ringan biasanya menghasilkan dua tipe *outcomes*. Dalam situasi dimana individu mengalah atas posisinya demi suatu hubungan, dengan hasil dimana tidak bertemunya tujuan masing-masing, disebut dengan hasil kalah-kalah (*lose-lose outcomes*). Dalam situasi dimana satu pihak mengakomodasi yang lain, terjadilah hasil kalah-menang (*lose-win outcomes*).

Reaksi-reaksi keras biasanya menghasilkan dua tipe *outcomes*. Hasil kalah-menang (*win-lose outcomes*) terjadi ketika kelompok yang lebih agresif menang dan penantang kalah. Reaksi keras terhadap konflik sering memimpin pada situasi dimana keinginan untuk menghukum atau memprovokasi penantang untuk mengambil tindakan balas dendam yang dapat melukai mereka sebagai musuhnya. Hasil ini disebut dengan hasil kalah-kalah (*lose-lose outcome*).

Reaksi yang bersifat prinsip terhadap konflik biasanya mengarah kepada hasil menang-menang (*win-win outcome*). Dengan menggunakan proses pemecahan masalah berdasarkan teori prinsip negosiasi, individu di dalam konflik bersepakat memecahkan bersama-sama tanpa mengunci posisi atau menghancurkan hubungan.

Selanjutnya konflik antar manusia menurut Cohen (1995:12) beroperasi pada salah satu dari tiga tingkatan, yaitu: 1) interpersonal, seperti ketika seseorang memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan atau menolaknya; 2) antarpersona, ketika salah satu berbeda pendapat dengan pasangannya tentang bagaimana membelanjakan uang; dan 3) antarkelompok, seperti ketika terjadi sengketa dengan kelompok, ras, dan bangsa lain. Sejalan dengan contoh di atas, Dugan (sebagaimana dikutip Maftuh, 2008: 15) menguraikan empat tipe konflik mulai dari yang sederhana sampai yang bersifat kompleks, yaitu *issues-*

specific conflict, *relational conflict*, *structural-subsystem conflict* dan *structural system conflict*. *Issues-specific conflict* adalah konflik tipe pertama yang paling sederhana yang sering terjadi antarindividu atau kelompok. Sumber dari *issues-specific conflict* adalah satu atau lebih isu, misalnya perbedaan penafsiran terhadap informasi yang sama, ketidaksepahaman atas sesuatu, dan seterusnya. Dalam *relational conflict*, isu atau masalahnya sendiri kadang-kadang tidak merupakan sumber sebenarnya dari konflik. Konflik jenis ini sering terjadi karena stereotip ataupun prasangka, sehingga disebut *nonrealistic conflict*. Dalam *structural conflict*, sumber konflik terlembagakan di dalam sistem sosial dan berada di luar hubungan pihak-pihak yang berkonflik. *Structural conflict* ini dapat dibagi ke dalam konflik dalam tingkat sub-sistem dan dalam tingkat sistem yang lebih luas. Konflik dalam tingkat subsistem maupun sistem sering mempengaruhi konflik antar individu dan antar kelompok yang merupakan anggota masyarakat tersebut. Konflik pada tingkat subsistem sering mencerminkan konflik pada tingkat sistem yang lebih luas, namun adakalanya konflik ini merupakan konflik yang berdiri sendiri.

Selain jenis-jenis konflik yang menunjukkan konflik yang secara umum terjadi dalam berbagai sistem sosial, Dugan (sebagaimana dikutip Maftuh, 2008:16) juga menguraikan empat tipe konflik siswa/mahasiswa, yaitu konflik kontroversi (*controversy*), konflik konseptual (*conceptual conflict*), konflik kepentingan (*conflict of interest*), dan konflik perkembangan (*developmental conflict*). Konflik kontroversi terjadi ketika gagasan atau pendapat seseorang tidak sejalan dengan gagasan dan pendapat orang lain dan keduanya berusaha mencapai kesepakatan. Konflik konseptual terjadi ketika gagasan-gagasan yang bertentangan terus menerus ada dalam pikiran seseorang atau ketika informasi yang diterima tidak sesuai dengan yang telah diketahui seseorang. Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang yang berkepentingan terhadap sesuatu berusaha mencegah atau menghalangi seseorang untuk mencapai kepentingan atau keuntungannya. Sementara konflik perkembangan antara orang dewasa dan anak-anak ketika seorang anak sedang dalam proses mencari jati dirinya.

Lalu mengapa di berbagai daerah sering terjadi konflik antar kelompok yang bersifat destruktif? Daniel Katz (sebagaimana dikutip Deutsch & Coleman, 2000:169) mengidentifikasi faktor ekonomi, nilai-nilai, dan perbedaan-perbedaan kekuatan sebagai penggerak utama. Konflik ekonomi adalah persaingan atas sumber daya yang langka, yang dapat terjadi pada situasi apa pun atas barang atau jasa yang diinginkan. Biasanya dalam sumber daya terbatas dan tidak mencukupi, dan kelompok ini sering memaknainya dengan pendekatan "distribusi" dengan asumsi kue didapat oleh yang menang, yang kalah tidak

mendapat bagian. Tahap strategi yang kompetitif dan perilaku yang dipandang adil bagi satu kelompok tapi dipandang tidak adil oleh yang kelompok lain) dan dengan demikian membuat frustrasi kelompok yang tidak mendapatkan bagiannya. Hubungan interaksi timbal balik di sepanjang garis ini biasanya menghasilkan suatu perasaan terancam dan perasaan bermusuhan.

Konflik nilai-nilai melibatkan perbedaan dalam kepercayaan suatu kelompok, mulai dari varians kecil dalam perbedaan prinsip sampai yang lebih besar seperti perbedaan dalam ideologi atau cara hidup. Konflik nilai-nilai dapat timbul atau berakhir bila tujuan atau dasar-dasar yang mereka jadikan prioritas telah tercapai. Sebagai contoh- organisasi sering terdiri atas kelompok-kelompok konflik karena keputusan yang harus dibuat (otokratis atau demokratis) dan hasil yang harus dihargai (misalnya, mengutamakan kualitas pelayanan atau pengembalian investasi). Contoh lain adalah masyarakat dunia yang merupakan kumpulan besar masyarakat yang terdiri atas berbagai kultur dan agama, dengan berbagai varian dalam preferensi, praktik dan prioritas yang dapat menempatkan mereka ke dalam situasi ketidakcocokan. Lagipula, pertanyaannya bagaimana kelompok-kelompok, khususnya kelompok yang dominan, memilih untuk sepakat dengan perbedaan-perbedaan- sebagai contoh, oleh pemaksaan norma-norma kultural mereka terhadap kelompok lain atau oleh dukungan respek antarbudaya dan harmoni.

Konflik kekuasaan terjadi ketika setiap kelompok berharap untuk memaksimalkan pengaruh dan kontrol terhadap hubungan satu sama lain. Pada dasarnya, ini adalah sebuah perjuangan untuk mendominasi, apakah dalam kantor sebuah perusahaan ataupun wilayah dunia. Hal seperti ini jarang dapat diselesaikan dengan cepat. Hasil dari perjuangan mungkin dapat menyebabkan kemenangan atau kekalahan atau ketegangan dan menemukan jalan buntu. Konflik kekuasaan sering didaur ulang melalui berbagai isu substantif, dan dari waktu ke waktu dinamisasi kalah-menang menjadi biasa. Hal ini, bagaimanapun juga, agar tidak membingungkan dengan penggunaanyang inheren dalam berbagai tipe atau jenis konflik yang dilakukan pihak-pihak yang berseberangan untuk mempengaruhi satu sama lain. Konflik kekuasaan sering dibedakan oleh penggunaan kekuasaan negatif (melalui ancaman, penipuan, atau manipulasi) sebagai lawan dari kekuasaan positif (seperti persuasi, penggunaan informasi yang valid, dan konsiderasi atau pertimbangan pro-kontra dari alternatif-alternatif tindakan).

Adapun konflik budaya menurut Bodine & Crawford (1998:4) terjadi karena perbedaan asal-usul kebangsaan atau etnis. Konflik sosial terjadi karena perbedaan gender, orientasi seksual, kelas, dan kemampuan fisik dan mental. Perlakuan pribadi dan kelembagaan terhadap perbedaan sering menimbulkan pada prasangka, diskriminasi, pelecehan, dan bahkan kejahatan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada bermacam-macam sumber konflik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sumber konflik adalah perbedaan pendapat dan kesenjangan sosial.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan sesuatu yang normal dan merupakan bagian dari kehidupan yang tak terhindari. Menurut Cohen (1995) konflik tidak hanya merupakan bagian dari kehidupan yang normal, ia juga merupakan bagian yang diperlukan. Konflik menjadi bagian yang secara khusus berperan signifikan dalam perkembangan psikologis manusia. Konflik yang kita alami dalam kehidupan membentuk karakter kita, budaya kita, dan dunia kita. Namun, konflik tidak selalu positif. Pada tingkat emosi, manusia dapat merasa tidak bahagia, marah, dan depresi sebagai akibat dari konflik.

Beberapa ahli sosiologi yang mempunyai kontribusi penting dalam teori konflik antara lain adalah Mills, Dahrendorf dan Coser. Ketiganya sudah membatasi pusat perhatian. Menurut Johnson (1986), Mills secara eksplisit membatasi analisisnya pada sifat saling mendukung dalam elit kekuasaan pada jenjang paling atas dalam dunia usaha, militer, dan lembaga politik di masyarakat Amerika. Dahrendorf dan Coser menyajikan suatu perspektif umum yang tidak terbatas pada satu masyarakat saja. Tetapi, Dahrendorf menjelaskan “asosiasi yang dikoordinasi secara mengharuskan” sebagai satuan analisisnya yang utama dan membatasi perhatiannya pada konflik antara tingkatan-tingkatan hirarki mengenai persebaran otoritas. Ini berarti model ini paling cocok untuk menangani konflik dalam organisasi birokratis atau masyarakat-masyarakat yang diorganisasi secara birokratis. Begitu pula perhatian Coser adalah bukan mengembangkan suatu teori komprehensif mengenai konflik, tetapi untuk memperlihatkan bahwa konflik dapat mempunyai fungsi positif untuk suatu kelompok atau masyarakat, khususnya apabila isu-isu konflik itu diakui dan dihadapi secara terbuka daripada ditekan.

Berikutnya ahli yang memberikan perhatian pada konflik adalah Collins. Selain menganalisa konflik pada tingkat mikro, Collins juga berusaha untuk menjelaskan proses sosial dalam organisasi yang sangat kompleks dan institusi sosial. Sesungguhnya, model konfliknya ini lebih komprehensif daripada model-model yang sudah disebutkan di atas. Dia tidak membatasi dirinya pada konflik ekonomi, atau konflik dalam organisasi birokratis.

Modelnya ini dapat diterapkan pada bidang institusional apa saja, seperti keluarga, organisasi agama, komunitas intelektual-ilmiah, dan struktur ekonomi, politik dan militer.

Semua ahli teori konflik yang dikemukakan di atas tidak banyak membahas masalah penanganan konflik ataupun resolusi konflik, padahal hal ini sangat penting dalam kehidupan manusia modern. Eben A. Weitzman (dalam Deutsch & Coleman, 2000:185) mengemukakan satu hal yang perlu dipikirkan ketika berpikir tentang apa yang dilakukan orang ketika mereka menyelesaikan konflik adalah bahwa mereka memecahkan masalah bersama-sama. Hal lain adalah berpikir bahwa ketika mereka membuat keputusan, juga dilakukan bersama-sama. Dalam "pemecahan masalah", kita membahas diagnosis konflik dan juga pengembangan kemungkinan alternatif untuk mengatasi konflik. Dalam "pengambilan keputusan", kita mempertimbangkan berbagai jenis keputusan orang yang terlibat dalam menyelesaikan konflik, baik secara individu dan bersama-sama, termasuk pilihan di antara kemungkinan alternatif dan komitmen untuk pilihan yang diputuskan.

B.PENDEKATAN RESOLUSI KONFLIK

Sebagaimana kita ketahui, karakter warganegara yang antara lain berupa memiliki kemampuan untuk bekerjasama dan saling toleransi tidak diwariskan sejak lahir, tetapi harus dibelajarkan dalam berbagai konteks. Oleh karena itu, perlu digunakan trilogi pendekatan pembinaan warganegara, yaitu pendekatan *psycho-paedagogical development*, pendekatan *socio-cultural development*, dan pendekatan *socio-political intervention* (lihat Budimansyah, 2009).

1. Pendekatan psycho-paedagogical development

Pendekatan *psycho-paedagogical development* adalah "pembinaan warganegara agar mereka dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, terutama keterampilan resolusi konflik." Dalam upaya membantu orang ataupun siswa memecahkan konflik dengan menggunakan pendekatan atau strategi yang konstruktif, beberapa ilmuwan dan praktisi mengembangkan bidang resolusi konflik yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemecahan masalah secara kooperatif. Dasar resolusi konflik adalah gagasan bahwa konflik adalah normal dan alamiah; individu dapat belajar ketrampilan pemecahan masalah secara konstruktif dan proses untuk

menyelesaikan konflik interpersonal dan antarkelompok. Keterampilan dan proses yang dibangun lebih pada prinsip kerja sama daripada persaingan (Bodine & Crawford, 1998:XV).

Pendekatan *psycho-paedagogical development* berangkat dari pemikiran bahwa betapa kita sangat sering menyaksikan konflik sosial terjadi di kalangan masyarakat, baik di tingkat masyarakat umum maupun di tingkat kaum terpelajar. Tidak jarang konflik yang terjadi berujung pada kekerasan karena masing-masing pihak yang berkonflik tidak memiliki keterampilan untuk mengatasi konflik atau menyelesaikan konflik dengan prinsip '*win-win solution*'. Mengingat eskalasi konflik tidak berkurang intensitasnya, maka warganegara perlu disiapkan agar memiliki sikap untuk bersedia bekerja sama dan kemampuan atau keterampilan dalam menciptakan kerjasama tersebut. Mengingat keterampilan bekerjasama ini tidak dibawa sejak lahir, maka harus dilatih dan dididik sedari kecil. Keterampilan untuk bekerjasama ini perlu dimiliki oleh warganegara, sebab dalam kehidupan sosial dimana setiap orang berinteraksi dengan orang lain, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik sehingga diperlukan suatu keterampilan untuk mengatasinya. Untuk itu warganegara perlu disiapkan agar memiliki sikap untuk bersedia bekerja sama dan keterampilan menciptakan kerjasama tersebut karena sikap keterampilan tersebut bukan datang dengan sendirinya, melainkan harus dilatih dan dididik sejak dini.

Bodine & Crawford (1998:4) mengemukakan pendidikan resolusi konflik diperlukan mengingat maraknya fenomena konflik sosial, khususnya di lingkungan sekolah. Sekolah seyogyanya dapat menjadi tempat di mana anak-anak belajar untuk hidup dalam hubungan sipil dengan satu sama lain dan mempersiapkan diri untuk mengambil peran masa depan mereka sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat dan pemimpin, dan sebagai anggota angkatan kerja produktif. Keterampilan resolusi konflik sangat penting untuk kehidupan publik seperti di sekolah, masyarakat, dan di tempat kerja. Keterampilan ini meliputi lebih dari satu set proses pemecahan masalah yang kompleks. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar tergantung, setidaknya sampai batas tertentu, tentang bagaimana orang melakukan kesepakatan satu sama lain setiap hari. Membangun hubungan yang efektif antara warga negara adalah penting untuk tidak hanya untuk mencapai persetujuan, tetapi juga untuk mengatasi jika orang lain memilih untuk tidak setuju.

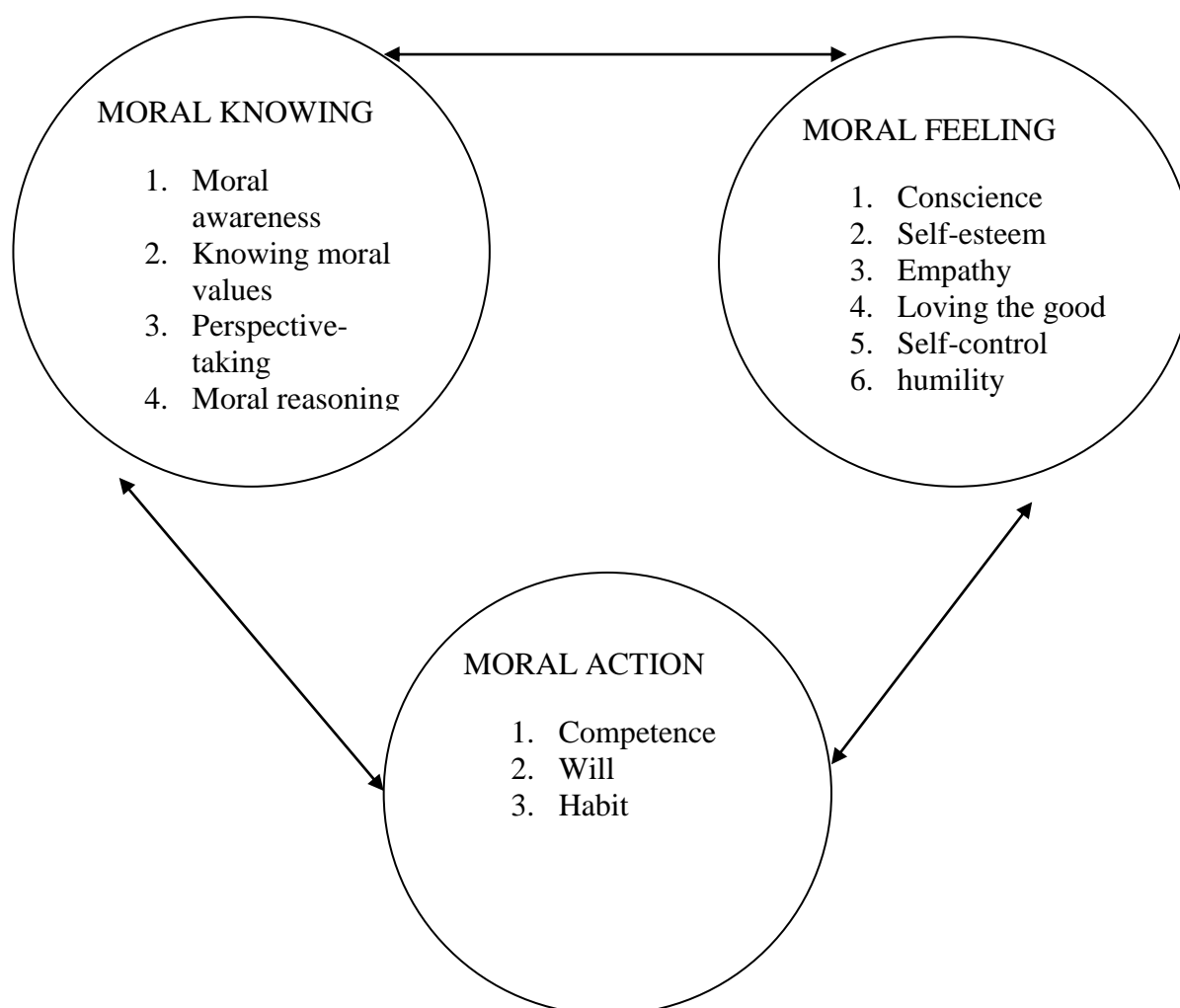
Bodine & Crawford (1998) juga mengemukakan bahwa seringkali anak muda menghadapi konflik sebelum, selama, dan setelah sekolah. Mereka mengalami *bullying*, godaan, dan pelecehan, kadang-kadang fatal, atau tidak masuk akal seperti perselisihan

karena pakaian dan barang-barang lainnya. Banyak dari konflik dimulai di sekolah, atau mereka bawa ke sekolah dari rumah atau dari komunitas masyarakat. menurut Bodine & Crawford (1998), sebagai orang dewasa, kita tidak bisa memecahkan masalah orang muda untuk mereka. Namun kita bisa memberi mereka pengetahuan, keterampilan, dan dorongan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan, menggunakan kata-kata, bukan tangan atau senjata. Pendidikan resolusi konflik mengajarkan negosiasi, mediasi, dan pengambilan keputusan melalui konsensus, yang memungkinkan pihak yang terlibat untuk mengeksplorasi solusi damai atas konflik. Ketika proses-proses pemecahan masalah untuk konflik dan perselisihan telah menjadi cara hidup, orang-orang muda mulai mendapatkan nilai dalam pergaulan atau bahkan mendapatkan jalan bagi kehidupan mereka.

Selanjutnya Bodine & Crawford (1998:5) mengemukakan bahwa pendidikan resolusi konflik juga membekali siswa atau pemuda dengan pengetahuan, kemampuan, dan proses yang diperlukan untuk memilih alternatif lain daripada perilaku yang merusak diri atau kekerasan ketika berhadapan dengan konflik interpersonal dan konflik antarkelompok. Harapannya adalah bahwa ketika pemuda mempelajari cara-cara konstruktif untuk mengatasi apa yang menyebabkan kekerasan, maka kejadian dan intensitas konflik yang akan berkurang.

Berdasarkan urai di atas, pendidikan resolusi konflik sangat diperlukan untuk mendidik warganegara agar memiliki *moral judgment and moral reasoning*. Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam pembelajaran pendidikan resolusi konflik. Nilai-nilai ini sejalan dengan komponen '*good character*' yang terdiri dari *moral knowing, moral feeling and moral action* sebagaimana dikemukakan Lickona (1992:53). Lebih lanjut Lickona mengemukakan menggambarkan keterkaitan ketiga bentuk moral tersebut sebagai berikut:

COMPONENTS OF GOOD CHARACTER



Untuk membelajarkan nilai-nilai sebagaimana dikemukakan oleh Lickona di atas, pendekatan *psycho-paedagogical development* dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan formal maupun non formal, yaitu melalui pendidikan di persekolahan (*civics school*), maupun yang berbasis kemasyarakatan (*community based citizenship education*), yaitu bagi organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan pendidikan luar sekolah. Bagi pendidikan dipersekolahan, dasar hukum pendekatan *psycho-paedagogical development* tersurat dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Pasal 3) adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia telah ditegaskan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 bahwa pendidikan adalah: “... usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1 butir 1)". Sejalan dengan UU Sisdiknas ini, perkembangan dalam pemikiran "pendidikan resolusi konflik" yang dintegrasikan dengan pendidikan kewarganegaraan merupakan "pendidikan untuk membangun jati diri kewarganegaraan yang berimplikasi pada pendidikan yang bukan hanya menekankan pada pengetahuan kewarganegaraan, tetapi pada pengembangan nilai, keterampilan dan pengertian." Pendidikan resolusi konflik yang dintegrasikan dengan PKn dan diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi sejalan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 37 bagian penjelasan yang berbunyi: "Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan resolusi konflik dapat berperan untuk mendidik warganegara agar bisa mengatasi konflik, khususnya konflik antarpersona dan konflik antarkelompok yang bersifat kekerasan dan destruktif. Disinilah pendidikan harus mampu menjalankan misi utamanya, yakni membangun karakter warganegara melalui pendidikan resolusi konflik.

2. Pendekatan *socio-cultural development*

Pendekatan *socio-cultural development* adalah "pembinaan warganegara melalui penguatan pranata sosial yang berunsurkan sistem nilai dan norma agar warganegara dapat berperan baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosiobudayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggung jawab (*doing* PKn)." Sehubungan dengan ini Durkheim memberi perhatian serius pada proses-proses sosial yang disebutnya "kohesi, solidaritas, integrasi, kekuasaan, ritual dan aturan sosial." Dengan kohesi Durkheim hendak menunjukkan bahwa "solidaritas sosial baik itu solidaritas mekanis maupun solidaritas organis, telah membawa masyarakat menuju peradaban tinggi dalam kehidupan manusia, yaitu kohesi sosial, sebagai kondisi dimana setiap elemen sosial berfungsi membuka *standart norm* bagi hidup bersama" (Johnson, 1986). Di sini penting kita mencatat berperannya lembaga-lembaga sosial dalam menjaga harmoni, dalam bentuk pranata rembug desa di Jawa, Pela di Maluku Tengah, Larvul Ngabal di Maluku Tenggara, dan banyak lagi contoh lainnya di berbagai daerah, sebagai suatu fakta

sosial dari adanya kehidupan setara diantara masyarakat. Jadi penerapan pendekatan ini juga dapat dilakukan melalui peran lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dalam menjaga harmoni.

Dasar teori pendekatan *socio-cultural development* adalah teori modal sosial. Modal sosial (*social capital*) merupakan terminologi yang dikembangkan oleh ahli-ahli ilmu sosial pada tahun 1980-an untuk memperkaya pemahaman tentang masyarakat dan komunitas. Modal sosial merupakan pemahaman dan pengetahuan bersama oleh komunitas, suatu pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan suatu kegiatan yang produktif. Cohen dan Prusak (dalam Grace, Rosaira & Prihadiyanti, 2008) mendefinisikan modal sosial sebagai “kumpulan dari hubungan aktif di antara manusia: rasa percaya, saling pengertian, dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerja sama.” Menurut Putnam (dalam Grace, Rosaira & Prihadiyanti, 2008) “modal sosial berbeda dengan modal finansial karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (*self-reinforcing*) dan modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan akan semakin bertambah. Rusaknya modal sosial justru lebih sering disebabkan karena tidak digunakan.”

Penerapan pendekatan *socio-cultural development* ini dapat dilakukan melalui pola jejaring (Woolcock dan Narayan dalam Grace, Rosaira & Prihadiyanti, 2008) memperkenalkan dua kondisi yang dipengaruhi dimensi modal sosial yang berguna untuk mempelajari pola jejaring. Kedua kondisi tersebut adalah *bridging* dan *bonding*. Secara spesifik, pembedaan kedua kondisi tersebut pada jejaring yang dimiliki. Jejaring yang bersifat homogen sering dikenal dengan istilah *bonding*, sedangkan yang bersifat heterogen disebut dengan *bridging*. *Bonding* sering diasosiasikan dengan *overlapping networks* yaitu lebih mengarah ke pembangunan hubungan eksternal. Putnam (dalam Grace, Rosaira & Prihadiyanti, 2008) mengaitkan *bridging* sebagai kegiatan ‘*getting ahead*’ dan *bonding* sebagai kegiatan ‘*getting by*’. *Bonding* melibatkan *trust* dan *reciprocity* dalam jejaring yang tertutup dan membantu proses *getting by*. Sebaliknya *getting ahead* difasilitasi melalui *cross-cutting ties* yang membentuk *bridging*. Putnam juga membahas *bridging* dan *bonding* sebagai dua hal yang dianggap sangat penting dalam mempelajari pola jejaring. *Bridging* terkait dengan perluasan jejaring, sedangkan *bonding* memperkuat kelompok yang homogen dan juga identitas yang sifatnya eksklusif. Putnam juga berargumen bahwa kondisi *bonding-bridging* dapat dikaji melalui dua dimensi sosial yang dikembangkan Nahapiet & Ghoshal. Dua dimensi sosial tersebut yakni:

1) Dimensi struktural

Dimensi ini terdiri atas struktur jejaring dan konfigurasi impersonal dari *linkages* antara orang-orang dan unit-unit. Wasserman dan Faust (dalam Grace, Rosaira & Prihadiyanti, 2008) mengemukakan bahwa *network* dan *network ties* menjadi pembentuk modal sosial. Densitas, keterkaitan, hierarki, dan organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang tak terduga di masa depan membentuk dimensi struktural dari modal sosial.

2) Dimensi relasional

Dimensi ini meliputi *one-to-one mutual respect*, pertemanan, *trust*, dan *reciprocity*. Selanjutnya Coleman (dalam Grace, Rosaira & Prihadiyanti, 2008) menambahkan elemen norma dan sanksi.

Modal sosial yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang memiliki keragaman kultur dapat meminimalisir terjadinya konflik. Penelitian Kolopaking (2006) menemukan bahwa jejaring sosial dapat digunakan untuk resolusi konflik antar kelompok. Dengan demikian, tidak selamanya keragaman budaya ataupun keragaman kultural menyebabkan konflik. Arief Budiman (dalam Setyanto dan Pulungan, 2009:45), mengatakan bahwa di Indonesia sesungguhnya yang terjadi adalah konflik kelas, bukan konflik identitas. Ia mencontohkan di Tangerang, orang Cina miskin bersatu dengan pribumi miskin tidak ada masalah. Hal ini membuktikan bahwa konflik sosial lebih sering terjadi karena masalah persaingan (*competition*) yang disebabkan oleh '*resources allocation*'. Penelitian Rusnaini (2006) di Bangka dan juga menemukan bahwa etnis Cina dan etnis Melayu serta etnis lainnya hidup rukun. Belum pernah terjadi kasus konflik etnis di pulau Bangka. Modal sosial menjadi salah satu faktor yang mendukung keharmonisan sosial masyarakat di sana. Jika di daerah lain dikatakan perayaan tahun baru Imlek dan perayaan keagamaan etnis Cina lainnya baru berlangsung sejak Abdurrachman Wahid menjadi Presiden RI, di pulau Bangka perayaan tersebut berlangsung dengan meriah sejak dulu sampai sekarang. Etnis lain pun sering berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Penelitian Rusnaini (2009) juga menemukan bahwa masyarakat Linggoasri yang berbeda agama dan budaya dapat hidup rukun penuh toleransi karena adanya modal sosial berupa kerjasama dalam setiap kegiatan sosial ataupun 'hajatan' keluarga. Data yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa modal sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mengatasi masalah etnisitas, dan menghilangkan stereotip dan prasangka. Kleden (2008:79-180) juga menolak anggapan bahwa perbedaan etnis, budaya, ras dan sebagainya bisa menimbulkan dendam antar etnis. Ia mengatakan perbedaan itu

paling-paling hanya menimbulkan kesulitan berkomunikasi atau salah pengertian karena adanya perbedaan dalam kebiasaan dan bentuk-bentuk ekspresi budaya. Ia mengatakan hubungan antar etnis akan menimbulkan konflik jika ada dominasi etnis yang satu terhadap etnis lainnya.

Paparan di atas menunjukkan bahwa perspektif teori modal sosial relevan untuk membahas keragaman kultural. Dalam kondisi dimana ada modal sosial, masalah keragaman kultural tidak menimbulkan konflik karena ada kerjasama antar individu atau kelompok. Sebagaimana diketahui, keterlibatan warga negara dan pemanfaatan modal sosial dalam pengelolaan masalah-masalah kemasyarakatan ditandai sebagai elemen penting bagi negara yang masyarakatnya plural. Dalam berbagai ruang yang penuh dengan simbol yang mendukung proses komunikasi dan pertukaran yang seimbang terdapat serangkaian definisi dan makna dari persamaan dan perbedaan antar etnis (lihat Abdullah 2006:86). Jadi, meskipun berbeda budaya, manusia seringkali memiliki jaringan pertemanan atau jaringan kerjasama dengan yang lainnya. Baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

3. Pendekatan *socio-political intervension*

Pendekatan *socio-political intervension* “merupakan pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, pimpinan dan anggota organisasi sosial dan politik untuk mengembangkan daya nalar (*state of mind*).” Dasar teori pendekatan *socio-political development* adalah teori kultur dan agensi Margareth Archer. Teori ini memandang masalah kultur berangkat dari teori morphogenetik yang perhatiannya atas bidang struktur dipusatkan pada persoalan bagaimana kondisi struktural mempengaruhi interaksi sosial dan bagaimana interaksi ini selanjutnya menimbulkan perluasan struktural. Archer melihat adanya persamaan kultur dengan sistem sosial dan dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif teori sistem yang serupa. Kultur adalah “produk keagenan manusia, namun pada waktu bersamaan bentuk interaksi sosial melekat didalamnya.” Archer mengatakan bahwa antara kultur dan struktur ada perbedaan konseptual. Struktur adalah “bidang fenomena material dan kepentingan, sedangkan kultur meliputi fenomena non material dan gagasan.” Teori Archer juga mempunyai dimensi konflik dan ketertiban. Bagian-bagian atau komponen sistem kultural mungkin bertentangan atau saling melengkapi. Ini membantu menentukan apakah agen akan terlibat dalam hubungan konflik atau hubungan yang teratur satu sama lain. Archer melihat “dualisme agen dan kultur, artinya bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Interaksi dan tindakan agen memunculkan struktur yang juga bereaksi dan berubah seiring tindakan dan

interaksi para agennya.” Dan perubahan itu senantiasa akan menciptakan perluasan struktural. Ada empat pendapat yang melandasi teori kultur dan agensi Archer:

- “ - Sistem kultural terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai hubungan logis satu sama lain.
- Sistem kultural mempunyai dampak sebab-akibat terhadap sistem sosiokultural
- Ada hubungan sebab-akibat antara individu yang ada di tingkat sosiokultural
- Perubahan di tingkat sosiokultural menimbulkan perubahan atau perluasan sistem kultural (Ritzer dan Goodman 2008:514-518).”

Teori agen dan kultur tersebut di atas membahas peran agen di tingkat sosiokultural dan perubahan kultural pada umumnya. Berdasar teori ini, para agen dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat.

Penerapan pendekatan *socio-political intervension* dapat dilakukan melalui upaya pemerintah pusat maupun daerah dengan cara mengeluarkan kebijakan ataupun seperangkat peraturan perundang-undangan yang dapat meningkatkan partisipasi warganegara yang bermutu dan bertanggungjawab. Peran negara dalam membina warganegara dapat juga dilakukan dalam membenahi sistem regulasi sosial yang ‘mandek’ atau tidak berfungsi. Negara juga dapat melakukan intervensi melalui saluran berupa berbagai media massa, terutama televisi dengan cara menyisipkan pesan-pesan secara ‘tidak kentara’ melalui program-program TV baik berupa berita maupun hiburan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa “komunikasi massa mempunyai dampak yang kuat sejauh meskipun dampak yang kuat itu tidak terjadi secara universal atau dengan mudah, tetapi hanya apabila digunakan teknik-teknik komunikasi yang tepat sesuai dengan keadaan-keadaan yang tepat (Severin & Tankard, 2008: 319). “

Selain menggunakan saluran berupa media massa, penerapan pendekatan *socio-political development* juga dapat menggunakan saluran antarpersona, yaitu para pemuka pendapat (*opinion leader*) yang menjadi panutan dalam suatu masyarakat atau agen-agen yang mempunyai pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam teori kultur dan agensi Margareth Archer.

Paparan di atas menunjukkan bahwa fenomena konflik sosial tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum yang ‘kurang terdidik’, melainkan juga terjadi di kalangan terpelajar. Konflik sosial marak terjadi sejak era pasca Soeharto. Di era Presiden Soeharto,

meskipun terjadi konflik sosial tetapi secara kuantitas tidak sebanyak saat ini dan secara kualitas juga tidak separah saat ini. Melihat banyaknya konflik sosial yang destruktif menunjukkan ketidakmampuan pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan konflik secara damai. Fenomena ini menunjukkan perlunya membangun suatu strategi umum resolusi konflik. Pedagogi program pendidikan resolusi konflik termasuk praktik dalam membangun kemampuan dasar serta praktik aktual menggunakan metode pemecahan masalah dengan resolusi konflik. Gagasan operasinya adalah praktek resolusi konflik dengan cara mentransfer apa yang dipelajari tentang proses resolusi konflik dengan simulasi seperti dalam kehidupan nyata. Siswa perlu diajarkan kerangka kerja intelektual, menyediakan alat untuk berpikir secara sistematis tentang konflik, dan diberi kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan dan menggunakan alat-alat dalam konteks kehidupan nyata. praktek yang memadai sesuai dengan usia dan beragam di “laboratorium” setting sekolah - percobaan, evaluasi, percobaan ulang- adalah kondisi mutlak untuk program pendidikan resolusi konflik yang sukses (Filner, kata pengantar dalam Bodine & Crawford, 1998:118).

Menurut Bambang W Soeharso (sebagaimana dikutip oleh Sajad, 2009) konflik dapat berkembang melampaui proses kompetisi normal menjadi konflik kekerasan yang negatif dan disfungsi sehingga dibutuhkan bantuan pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikannya. Terdapat sepuluh cara penyelesaian konflik:

1. Penghindaran (*conflict avoidance*)
2. Diskusi dan penyelesaian masalah secara damai (*informal discussion and problem solving*)
3. Negosiasi (*negotiation*)
4. Mediasi (*mediation*)
5. Keputusan administratif (*administratif decision*)
6. Arbitrasi (*arbitration*)
7. Keputusan hukum (*judicial decision*)
8. Keputusan legislatif (*legislatif desicion*)
9. Paksaan tanpa kekerasan (*nonviolent direct action*)
10. Paksaan dengan kekerasan (*violent direct action*)

Dari sepuluh cara penyelesaian konflik di atas, mulai nomor 1,2,3,4,9 dapat diajarkan dalam pendidikan resolusi konflik, nomor 5, 6, 7,10 dilakukan oleh pemerintah atau yang mewakilinya seperti pihak yang berwajib (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, nomor 7 oleh

badan legislatif. Selanjutnya makalah ini akan mendiskusikan pendidikan resolusi konflik di lingkungan pendidikan.

C. METODE PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Menurut Deutsch & Coleman (2000:15-16) dasar-dasar pendidikan resolusi konflik dapat mengacu pada riset dan teori psikologi sosial selama empat puluh tahun terakhir yang dilakukan berdasarkan pada delapan pertanyaan penting, yakni:

1. Kondisi apa yang menimbulkan proses konstruktif atau destruktif resolusi konflik? Dalam hal tawar-menawar dan negosiasi, penekanan di sini adalah dalam menentukan keadaan yang memungkinkan para pihak yang bertentangan untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan yang dapat memaksimalkan hasil bersama mereka.
2. Apa situasi, strategi, dan taktik memimpin salah satu pihak untuk berbuat lebih baik daripada yang lain dalam situasi konflik? Penekanan di sini adalah antara pihak-pihak yang berkonflik merasa lebih baik membuat kesepakatan lebih baik daripada memusuhi seseorang.
3. Apakah yang menentukan sifat perjanjian antara pihak-pihak yang saling bertentangan, jika mereka mampu mencapai kesepakatan? Di sini perhatian dengan faktor-faktor kognitif dan normatif yang memimpin orang-orang untuk membuat kemungkinan suatu perjanjian dan melihatnya sebagai kemungkinan penting untuk mencapai kesepakatan yang stabil – di mana masing-masing pihak yang saling bertentangan melihat sebagai 'hanya' dalam situasi.
4. Bagaimana pihak ketiga bisa digunakan untuk mencegah konflik dari menjadi destruktif atau untuk menyelesaikan kebuntuan atau sakit hati sehingga negosiator bergerak ke arah pengelolaan konflik secara konstruktif?
5. Bagaimana orang bisa dididik untuk mengelola konflik mereka secara konstruktif? Ini telah menjadi perhatian dari konsultan yang bekerja dengan para pemimpin di industri dan pemerintah dan juga dengan orang-orang memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak di sekolah kami.
6. Bagaimana dan kapan menetralkan konflik kekerasan yang berkepanjangan? Sebagian besar literatur dalam resolusi konflik telah menekankan pada pencegahan daripada perbaikan.

7. Bagaimana kita untuk memahami mengapa etnis, agama, dan konflik identitas sering menimbulkan kekerasan dan merusak?
8. Bagaimana berlaku dalam konteks budaya lainnya adalah teori yang berhubungan dengan konflik yang sebagian besar dikembangkan.

Adapun tahap-tahap pengembangan kemampuan atau keterampilan resolusi konflik menurut Filner (kata pengantar dalam Bodine & Crawford, 1998) sebagai berikut:

- 1) Kemampuan orientasi (*orientation abilities*) yang terdiri atas:
 - a. memahami bahwa memiliki konflik adalah alami; mengetahui tahu bahwa keterlibatan dalam konflik bukan masalah
 - b. mengetahui bahwa konflik dapat diselesaikan dengan kerjasama
 - c. membedakan antara prasangka (*prejudice*) dan perasaan tidak suka
 - d. memandang perdamaian sebagai kondisi yang diinginkan dan dapat mengidentifikasi beberapa perilaku pembuat perdamaian (*peacemaking*) dan perilaku perusak perdamaian (*peacebreaking*).
- 2) Kemampuan persepsi, yang terdiri atas:
 - a. menerima bahwa dia tidak selalu “benar”
 - b. menerima bahwa orang lain mungkin memiliki pandangan berbeda
 - c. mendeskripsikan suatu konflik dari perspektif sendiri dan dari pandangan (*point of view*) orang lain
 - d. menahan diri untuk menyalahkan orang lain
- 3) Kemampuan mengontrol emosi, terdiri atas:
 - a. mengetahui bahwa perasaan marah, frustrasi, dan takut bukanlah masalah
 - b. mengontrol kemarahan
 - c. mengungkapkan perasaan dalam bahasa yang tidak terlalu memperluas rasa bahagia, sedih, gembira, atau marah
 - d. mendengarkan dan mengakui perasaan orang lain
 - e. tidak bereaksi secara emosional terhadap luapan emosi orang lain
- 4). Kemampuan berkomunikasi
- 5). Kemampuan berpikir kreatif

- 6). Kemampuan bernegosiasi
- 7). Kemampuan melakukan mediasi
- 8). Kemampuan membuat keputusan berdasarkan konsensus

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode yang perlu dilakukan dalam pembelajaran pendidikan resolusi konflik dilingkungan pendidikan adalah metode *personal development* (pengembangan kepribadian), *reflective inquiry*, dan metode *rational decision making* (Maftuh, 2010:32). Metode *personal development*” bertujuan membantu siswa untuk mengembangkan secara penuh potensi sosial, emosional, fisik dan kognitif agar siswa menjadi anggota masyarakat yang sehat secara mental, psikologis, dan fisiknya serta produktif.” Metode *reflektif inquiry* dilakukan “untuk mendorong dan melatih siswa mengembangkan dan menggunakan keterampilan berpikir reflektif. Keterampilan reflektif ini berkaitan dengan kemampuan keterampilan kritis, pemecahan masalah, penelitian ilmiah, berpikir induktif, kajian nilai, dan pengambilan keputusan yang rasional.” Model pendidikan seperti ini mendidik siswa untuk belajar berpikir mengkaji masalah-masalah sosial secara kritis yang diperlukan dalam kehidupan. Pendekatan *rational decision* “bertujuan untuk mengajari siswa membuat keputusan yang rasional dan bertindak sesuai dengan keputusannya tersebut. Kemampuan mengambil keputusan yang rasional berarti kemampuan menggunakan keterampilan intelektual yang tinggi untuk menjawab pertanyaan pribadi dan sosial.” Metode membuat keputusan yang rasional ini mencakup berbagai aksi sosial yang didasarkan pada keputusan tersebut.

D. KEDUDUKAN PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Kedudukan, fungsi, dan visi pendidikan resolusi konflik sebagai program pendidikan kurikuler tidak dapat dilepaskan dari komitmen berbangsa dan bernegara Indonesia secara sosio-politik dan konstitusional. Namun, berhubung mata pelajaran di sekolah-sekolah sejak pendidikan dasar (SD) sampai pendidikan menengah atas (SMA) di Indonesia ini sudah terlalu banyak, maka akan sulit menambah satu mata pelajaran lagi ke dalam kurikulum. Sebagai solusi alternatif, pendidikan resolusi konflik dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan kewarganegaraan (PKn). Di beberapa negara, seperti di Inggris, resolusi konflik merupakan bagian dari materi Pendidikan Kewarganegaraan (*civics atau citizenship education*). Pendidikan resolusi konflik dapat diintegrasikan dengan PKn dan diajarkan mulai

dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi sejalan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 37 bagian penjelasan yang berbunyi: “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Pertimbangan lainnya menurut penulis adalah pendidikan resolusi konflik sangat tepat jika diintegrasikan ke dalam PKn karena PKn diajarkan mulai dari tingkat SD sampai SMA, bahkan juga di perguruan tinggi. Selain itu, menurut Maftuh (2008:97) PKn di Indonesia yang bersifat pendidikan afektif memang sangat berkaitan erat dengan Pendidikan resolusi Konflik yang juga bersifat afektif. Pendidikan resolusi konflik sangat berkaitan dengan hal-hal yang bersifat afektif, seperti pengendalian emosi, rasa marah, rasa permusuhan, rasa dendam, pengembangan sikap positif, toleransi, simpati, empati, menyadari perspektif orang lain, menghargai dan peduli pada orang lain, dan sebagainya.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan yang mengorganisasikan tentang pembelajaran warga untuk mencapai sikap keterampilan seperti tersebut di atas. Pembelajaran seperti ini tidak bersifat “*knowledge-based*”, tetapi lebih pada nilai psikomotorik atau keterampilan kewarganegaraan. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran kewarganegaraan yang dikenal dengan “*student centered learning*”, seperti “pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kontekstual, dan model pembelajaran portofolio ataupun dengan model *project citizen*.” Selanjutnya dalam rangka pembanginan karakter bangsa, pendidikan kewarganegaraan menekankan pada proses mendidik warganegara agar memiliki “kompetensi kewarganegaraan ideal.”

Kompetensi ideal seorang warga negara menurut Branson (1998) adalah dimilikinya tiga kompetensi, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan) dan *civic dispositions* (karakter kewarganegaraan). Selanjutnya *civic dispositions* menurutnya terdiri atas *private* dan *public character* (karakter privat dan publik) sebagai hal yang esensial bagi perkembangan demokrasi konstitusional. Karakter privat misalnya, pertanggungjawaban moral, disiplin diri, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Karakter publik misalnya, taat terhadap peraturan, bersikap kritis, sopan, kesediaan mendengar, kemauan bernegosiasi dan kompromi. Dimensi pribadi dan sosial, karakter privat dan publik, memang tidak dapat dipisahkan dari warga negara.

Dimensi sosial kewarganegaraan “mengakui bahwa, meskipun sifat-sifat pribadi perlu sekali, sifat-sifat itu sendiri tidaklah cukup. Dengan kata lain, “kewarganegaraan pada

pokoknya merupakan satu aktivitas sosial. Kewarganegaraan melibatkan orang yang hidup dan bekerja sama untuk tujuan-tujuan kewarganegaraan.” Maka, warga negara harus memiliki kemampuan bekerja dan berinteraksi dengan orang lain di dalam berbagai situasi dan kondisi. Maftuh (2010) mengemukakan bahwa kemampuan ini merupakan ketrampilan sosial yang perlu untuk dikembangkan. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa tuntutan untuk memiliki keterampilan kerja sama (kolaborasi) bukan hanya pada kehidupan di tingkat lokal maupun nasional, tetapi sekarang sudah pada tingkat global.

Sesuai dengan misi pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan potensi peserta didik agar memiliki “*civic intelligence*”, “*civic participation*”, dan *civic responsibility*, maka pembelajaran pun harus bisa membentuk kecerdasan yang multidimensional, yaitu mencakup kecerdasan pribadi, kecerdasan sosial, kecerdasan spatial, dan kecerdasan temporal. Kecerdasan pribadi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

“Kapasitas untuk berpikir secara kritis dan sistematis; Pemahaman dan kepekaan terhadap masalah-masalah perbedaan budaya; Pilihan terhadap pemecahan dan penyelesaian masalah yang bertanggung jawab, kooperatif, dan tanpa kekerasan; Keinginan untuk melindungi lingkungan, membela hak asasi manusia, dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat.”

Adapun kecerdasan sosial berkaitan dengan partisipasi seorang warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Kecerdasan sosial merupakan suatu aktivitas sosial dimana orang hidup dan bekerja sama untuk tujuan-tujuan kewarganegaraan. Di sinilah dituntut kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain di dalam berbagai keadaan dan konteks. Berikutnya, kecerdasan spatial berkaitan dengan keberadaan seorang warga negara dalam kehidupan komunitas. Dalam hal ini seorang warga negara harus mampu memahami kedudukannya sebagai anggota komunitas yang tumpang tindih---lokal, regional, nasional dan multinasional. Meskipun berpartisipasi dalam kehidupan global, seorang warga negara harus tetap memiliki rasa identitas yang berakar pada tingkat lokal dan pribadi, dalam hal ini negara dan budaya. Terakhir, kecerdasan temporal adalah kemampuan seorang warga negara dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan. Meskipun berada atau hidup dalam masa sekarang, mereka tidak boleh melupakan masa lalu. Warga negara perlu pengetahuan sejarah yang luas agar mereka memiliki rasa saling keterhubungan atau keberakaran pada masa lalu. Warga negara juga perlu menyadari dan memahami bahwa tindakan-tindakan yang mereka lakukan pada masa sekarang bisa berdampak terhadap masa depan.

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya memfokuskan pada cara-cara mendidik warganegara agar memiliki kemampuan berpikir, bersikap, berbuat dan berkeyakinan di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Winataputra (2006), “hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual-normatif pendidikan di Indonesia menerapkan prinsip *confluent education* yakni pendidikan yang mengembangkan seluruh dimensi personal dan sosial peserta didik.” Selanjutnya ia mengatakan bahwa:

“Konsep pendidikan seperti ini secara filsafat bertolak dari pemikiran *reconstructed philosophy of education* yang secara sinergistik memadukan kekuatan dan filsafat *perennialism, essentialism, progressivism, dan social reconstructionism*. Fokus pendidikan kewarganegaraan seperti yang dikemukakan di atas sangat ideal mengingat hakekat manusia selaku *social and political human being*, dimana sejak lahir kita hidup ‘*in group*’ dalam keluarga dan komunitas yang akhirnya berbangsa bernegara (*Zoon politicon, organized political man*)” (Winataputra, 2006).

Berkaitan dengan hal yang dikemukakan di atas, Sapriya (2007) mengemukakan bahwa “secara ontologis, sistem pengetahuan PKn memiliki obyek telaah ‘*civic behavior*’ dan ‘*civic culture*’ yang bersifat multidimensional, ilmiah, kurikuler, dan sosial kultural”. Ini berarti pembelajaran PKn disamping bersifat kontekstual, namun tetap memperhatikan segi keilmiahannya agar dapat menumbuhkan sikap kritis peserta didik. PKn yang efektif merupakan pembelajaran PKn yang bersifat multidimensional sesuai dengan dua dimensi ontologi PKn, yakni obyek telaah dan obyek pengembangan. Yang dimaksud obyek telaah adalah “keseluruhan aspek idiil, instrumental, dan praksis PKn yang secara internal dan eksternal mendukung sistem kurikulum dan pembelajaran PKn di sekolah dan luar sekolah, serta format gerakan sosio-kultural masyarakat.” Adapun yang dimaksud obyek pengembangan atau sasaran pembentukan adalah “keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif dan psikomotorik yang menyangkut status, hak, dan kewajibannya sebagai warganegara yang perlu dimuliakan dan dikembangkan secara programatik guna mencapai kualitas warganegara yang “cerdas dan baik”, dalam arti demokratis, religius, dan berkeadaban dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (Winataputra, 2001). Jadi, pengintegrasian pendidikan resolusi konflik ke dalam PKn merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok bahasan yang perlu dimasukkan dalam pendidikan resolusi konflik yang diintegrasikan ke dalam PKn adalah:

1. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam resolusi konflik;

2. Pemecahan masalah sebagai pencarian untuk kebaikan, solusi konstruktif, saling memuaskan;
3. Pengambilan keputusan yang terjadi baik selama dan setelah proses pemecahan masalah. Pada kedua titik ini ada keputusan bahwa masing-masing pihak membuat keputusan bersama-sama;
4. Suatu kecenderungan dasar bahwa orang akan melindungi ego dan kepentingan mereka sendiri (Deutsch & Coleman, 2000).

Untuk membelajarkan pokok-pokok bahasan di atas, Filner (dalam Bodine & Crawford, 1998: 119-121) mengemukakan kegiatan efektif tambahan untuk kelas 3-5 adalah integrasi pemecahan masalah dari kurikulum standar, permainan peran, proyek kelas dan pertemuan, membangun sebuah program peer-mediasi berbasis sekolah, video, game, schoolassemblies, demonstrasi kelas, dan siswa presentasi kepada orangtua dan kelompok masyarakat.

Belajar tambahan dan kegiatan praktek khususnya sesuai untuk kelas enam sampai tingkat sekolah menengah pertama (SMP) meliputi pelatihan anak-anak untuk menjadi pelatih siswa muda dalam penggunaan strategi pemecahan masalah resolusi konflik (dengan membantu mereka untuk bernegosiasi atau membuat konsensus dengan memfasilitasi sesi keputusan), mengintegrasikan resolusi konflik ke dalam kurikulum sekolah biasa, demonstrasi pertemuan sekolah, video, setelah siswa membuat latihan sendiri peran-bermain, dan interaksi dengan komunitas yang lebih besar dengan memberikan demonstrasi informasi atau sandiwara atau dengan menyediakan layanan resolusi konflik yang sebenarnya untuk organisasi masyarakat.

Belajar dan kegiatan praktek untuk kelompok usia sekolah tinggi termasuk program mediasi rekan, pelatihan siswa untuk melatih siswa lain untuk melayani sebagai mediator rekan, majelis sekolah dan demonstrasi, membuat latihan peran-bermain, memproduksi video, mahasiswa dan profesional yang memiliki sekolah menawarkan pelatihan resolusi konflik dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih besar, membiarkan siswa membantu sekolah untuk anak-anak muda dalam mengembangkan program resolusi konflik, siswa melayani sebagai mediator atau fasilitator untuk program komunitas bagi anak-anak muda dan warga senior atau kelompok berbasis masyarakat lainnya, dan meminta siswa untuk bertindak sebagai mediator dalam sengketa lingkungan (semua jenis sekolah dan sengketa masyarakat). Dalam kerangka kerja sekolah menengah, pendidikan resolusi konflik dapat ditawarkan sebagai program studi tertentu dalam kurikulum umum, diintegrasikan ke dalam

semua program lain yang ditawarkan, atau dikelola sebagai unit khusus atau program ekstrakurikuler.

Belajar dan kegiatan praktek untuk setiap tingkat usia ini harus dirancang untuk mencapai semua saluran belajar dan semua gaya belajar. Siswa harus secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang memperkuat pelajaran. guru dan profesional lainnya harus alert dan sensitif terhadap "saat mendidik" dan merespon saat-saat. Insiden ini sangat nyata memiliki potensi untuk merangsang dan membuat relevan pembelajaran kemampuan resolusi konflik. Penggunaan proses resolusi konflik tidak dapat terlalu menekankan bahwa siswa juga belajar apa yang mereka temukan dalam kehidupan orang dewasa yang berkomunikasi banyak dan perilaku mereka menjadi model. Pemodelan perilaku yang sesuai dan yang diinginkan tidak menggantikan kebutuhan untuk menyediakan kesempatan belajar dan praktek bagi siswa, tetapi model yang tidak tepat oleh orang dewasa dengan mudah bahkan meniadakan jadwal praktek yang paling ketat.

E. MODEL/PENDEKATAN PENDIDIKAN RESOLUSI KONFLIK BERBASIS SEKOLAH

Pendekatan pendidikan resolusi konflik di negara Amerika Serikat dapat dijadikan acuan bagi pendidikan resolusi konflik di Indonesia. Bodine dan Crawford (1996) mengemukakan empat pendekatan pendidikan resolusi konflik berbasis sekolah di Amerika Serikat, yaitu:

- Proses kurikulum
- Program mediasi
- Ruang kelas tanpa cinta damai
- Sekolah cinta damai

Tipikal program di atas dipilih untuk peningkatan pengetahuan, pengajaran, dan dukungan penuh untuk pemecahan secara damai terhadap pertikaian disekitar orang-orang, tanpa melihat umur, ras, latar belakang etnis, atau status sosial ekonomi.

Proses kurikulum adalah pendekatan pendidikan resolusi konflik yang dikarakterisasikan dengan menyediakan waktu khusus untuk mengajarkan kemampuan dasar, prinsip-prinsip, dan satu atau lebih proses resolusi konflik sebagai jalur terpisah, kurikulum berbeda, atau rencana pembelajaran sehari-hari. Guru-guru yang menggunakan proses

pendekatan kurikulum mengajarkan resolusi konflik melalui pengajaran batas-waktu, pelajaran sehari-hari selama satu semester, atau seri-seri lokakarya, pemberian nasihat bisa juga dilaksanakan diruangan selama periode sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Program untuk negosiator muda (*the program for young negotiator (PYN)*), suatu program proses kurikulum yang dikembangkan oleh Jared Curhan, yang bertujuan untuk mendidik individu-individu bagaimana cara meraih tujuan. Kemampuan dasar dari sudut pandang dan pemikiran yang diajarkan di kelas negosiasi dapat membantu siswa belajar bahwa untuk memenuhi kepentingan mereka, mereka harus berempati dengan kepentingan yang lain. PYN terdiri dari empat komponen:

- Pelatihan guru dan keterlibatan komunitas
- Kurikulum negosiasi
- Tindak lanjut kesempatan-kesempatan
- Inovasi dan perkembangan kurikulum yang berkelanjutan

Pertama-tama program melatih guru sekolah dan administrator (tata usaha) bernegosiasi dengan isu-isu disekitarnya. Selama pelatihan seminar, peserta mempelajari negosiasi dari para ahli seperti professor negosiasi dan praktek bernegosiasi. Setelah guru mengajar konsep negosiasi kepada murid-murid mereka lanjutkan dengan mengikuti pertemuan implementasi kurikulum reguler dan disediakan dukungan teknis berkelanjutan.

Kurikulum negosiasi mempersembahkan kemampuan bernegosiasi bukan sebagai alternatif untuk kekerasan, melainkan sebagai syarat penting untuk kehidupan yang berarti dan sukses. Kurikulum ini sangat mengandalkan pada pengalaman pembelajaran, dimulai dengan kasus-kasus yang menyoroti prinsip-prinsip dasar, tetapi seiring berkembangnya kurikulum, contoh kasus lebih banyak diambil dari kehidupan remaja.

Tindak lanjut antara lain dilakukan ketika guru-guru menyelesaikan kurikulum dasar di kelas seperti daftar berikut ini:

- Melatih kelompok murid-murid baru dengan kurikulum serupa
- Mengintegrasikan konsep negosiasi kedalam area subyek
- Menyusun lokakarya negosiasi untuk orang tua dan anggota komunitas
- Mengembangkan kelompok negosiator muda
- Melatih anggota dewan murid
- Mengadakan periode negosiasi mingguan atau bulanan yang membantu murid-murid

dengan masalahnya masing-masing

- Mengorganisir kelompok-kelompok murid yang difokuskan untuk pengembangan pengajaran

Selanjutnya inovasi dan perkembangan kurikulum yang berkelanjutan yang dilakukan di Miami, Florida menawarkan tingkat kelas khusus kurikulum kelas percobaan untuk pendidikan usia dini melalui kelas 12. Kurikulum ini mempersatukan cakupan, rangkaian isi, dan rangkaian keterampilan. Pendidikan Dasar Perdamaian atau *The Peace Education Foundation* (PEF) memandang konflik sebagai kumpulan pengetahuan dan keterampilan yang melengkapi seorang individu dengan kemampuan untuk tidak menggunakan kekerasan, pendekatan yang membangun ketika berurusan dengan masalah yang tidak terelakkan. Isi dari kurikulum pemecahan masalah PEF meliputi jajaran kompetensi keterampilan sosial yang dikelompokkan kedalam lima komponen, yaitu:

- Pembentukan komunitas
- Pemahaman konflik
- Persepsi
- Mengelola kemarahan (penguasaan diri)
- Aturan untuk bersaing secara sehat

Dalam kurikulum ini terdapat lima strategi yang digunakan guru dalam mempermudah proses dari kurikulum resolusi konflik, diantaranya:

- Memberikan contoh
- Memberikan pengajaran
- Memberikan pelatihan
- Memberikan motivasi
- Membuat delegasi siswa

Kurikulum mediasi adalah tahap selanjutnya dalam mengimplementasikan dengan baik program resolusi konflik yang didalamnya termasuk kurikulum untuk kelas 4 sampai 7 dan 8 sampai 12. Keterlibatan orang tua dalam mendukung program sekolah yang berbasis resolusi konflik adalah sangat penting. PEF memiliki alat yang beragam dalam implementasi yang dapat digunakan di kelas, sekolah, dan di sekitar sekolah. Komponen-komponen

resolusi konflik PEF bisa digabungkan dalam pembelajaran tradisional, juga dapat membantu meresolusi konflik di rumah.

Program Mediasi merupakan suatu program pendidikan resolusi konflik yang mana individu terpilih (dewasa dan/atau siswa) dilatih prinsip-prinsip dan keterampilan dasar dari resolusi konflik dan supaya menjadi pihak ketiga yang memfasilitasi pihak yang bertikai untuk mencapai suatu resolusi dalam proses mediasi. Proses Mediasi adalah suatu mekanisme dalam resolusi konflik masalah yang dapat digunakan dalam situasi sekolah, komunitas/masyarakat, organisasi kepemudaan, dan tata cara peradilan remaja. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, program mediasi dibuat untuk:

- Mengurangi sejumlah tindakan disipliner seperti, penahanan, suspensi, dan pengontrolan pergerakan.
- Mendorong resolusi konflik lebih efektif.
- Mengurangi waktu orang dewasa pemimpin muda dalam menghabiskan waktu menghadapi konflik antar pemuda.
- Memperbaiki suasana sekolah atau lembaga
- Menyediakan pemuda dan staf dengan forum alternatif untuk resolusi konflik.

Program mediasi dapat membantu pengelolaan dan resolusi konflik antar pemuda, antar pemuda dan orang dewasa, serta antar orang dewasa. Mediasi adalah proses dimana satu atau lebih mediator atau menjadi fasilitator netral untuk membantu menegosiasikan persetujuan dari pihak yang bertikai. Selama mediasi, penengah menggunakan enam langkah resolusi konflik berikut ini:

- Menyiapkan tahapan dan membuat peraturan dasar resolusi konflik
- Mengumpulkan sudut pandang dari kedua belah pihak yang bertikai.
- Mengidentifikasi kepentingan.
- Membuat pilihan yang mengacu pada kepentingan keduanya.
- Mengevaluasi pilihan-pilihan tersebut sebagai kriteria yang objektif.
- Menciptakan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Adapun program mediasi rekan adalah tipe program resolusi konflik yang paling banyak digunakan di sekolah. Generasi muda dapat menjadi mediator yang efektif karena mereka memahami rekannya, menciptakan proses yang sesuai usia, memberdayakan rekan mereka, dan menormalkan proses resolusi konflik. Generasi muda dapat berhubungan dengan

mereka dimana orang dewasa tidak dapat melakukannya. Mediator rekan dapat meringkai persengketaan dalam hal sudut pandang, bahasa, dan perilaku generasi muda. Di seluruh sekolah program mediasi rekan adalah suatu kerangka kerja siswa yang dilatih dalam resolusi konflik. Pelatihan mediasi rekan itu fleksibel dan mengakomodasi jadwal sekolah dan sumber daya serta tingkat perkembangan siswa yang terlibat. Pengembangan keterampilan dalam proses mediasi adalah kegiatan seumur hidup. Mediator rekan didorong untuk berlatih dan menggunakan pelatihan mereka dalam resolusi konflik sesering mungkin serta untuk mengambil kelas penyegaran.

Program mediasi rekan menawarkan semua generasi muda cara yang konstruktif dalam menyelesaikan masalah. Mediator rekan yang dilatih dengan baik memperoleh keterampilan dan internalisasi resolusi konflik yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Kesuksesan program ini tergantung dari komitmen dan dukungan dari seluruh staf sekolah. Pada saat pertemuan, staf diberikan beberapa pilihan berikut ini:

- Mengikrarkan dukungan umum untuk program
- Mengarahkan para murid kepada mediasi dan dorongan ikut serta dalam proses
- Sepakat ikut serta mediasi dengan murid jika sesuai
- Ikut serta dalam pelatihan resolusi konflik jika pelatihan ditawarkan disekolah
- Ikut serta dalam pelatihan mediasi dan bertindak sebagai staf mediator
- Bertindak sebagai anggota tim implementasi mediasi
- Bertindak sebagai koordinator program

Pada beberapa peran yang disebutkan, guru mendemonstrasikan nilai dan pentingnya resolusi konflik dan komunikasi dengan mengaplikasikan keterampilan-keterampilannya di kelas, kantor, dan dalam berinteraksi dengan kolega dan orang tua. Pemilihan mediator rekan pelaksanaannya hampir sama dengan tingkat dasar, menengah, dan tingkat atas. Murid-murid dan staf dinominasikan sebagai mediator yang memiliki potensi, dan dewan guru yang membuat putusan akhir berdasarkan keseimbangan dari faktor negatif dan positifnya. Murid-murid dan staf yang kemudian dilatih dalam proses mediasi. Pada tingkat dasar, mediator yang terpilih dari kelas 4 sampai 6 mendapatkan tambahan 9 jam pelatihan setelah mereka menyelesaikan kurikulum mediasi. Setelah pengumuman kelulusan, tim mediator murid yang terdiri dari dua orang mengawasi lapangan untuk pengembangan konflik dan menawarkan bantuannya untuk resolusi konflik.

Ruangan kelas cinta damai merupakan metode kelas keseluruhan yang termasuk didalamnya mengajar keterampilan dasar, prinsip siswa, dan satu atau lebih dari tiga proses resolusi konflik. Pendidikan resolusi konflik masalah tergabung kedalam subyek inti kurikulum dan kedalam strategi pengelolaan kelas. Ruang kelas cinta damai adalah dasar dari sekolah cinta damai.

Ruangan kelas cinta damai diprakarsai pada basis dari tiap-tiap guru. Pendekatan ini memadukan resolusi konflik kepada kurikulum dan kedalam pengelolaan ruangan kelas, serta menggunakan metode instruksional dari kontroversi pembelajaran kooperatif dan perdebatan akademik.

Perpaduan kurikulum dan pengelolaan ruangan kelas terjadi ketika keterampilan dan konsep diperlukan untuk resolusi konflik yang tergabung dengan subyek inti dengan cara yang membangun. Guru yang memadukan resolusi konflik kedalam kurikulum membantu menciptakan lingkungan ruangan kelas yang mendukung resolusi konflik dan sikap prososial. William Kreidlerr, perintis ruangan kelas cinta damai memandang bahwa ruangan kelas sebagai perlindungan dan komunitas yang terhormat yang memiliki lima kualitas, yaitu: kerjasama, komunikasi, ekspresi emosional, apresiasi terhadap keberagaman, dan resolusi konflik. Ruang kelas cinta damai tergabung dalam kegiatan belajar dan pembelajaran yang dapat mendorong generasi muda untuk mengenali dan memilih pilihan dalam situasi konflik, bertemunya keterlibatan kepentingan dari para individu, dan meningkatkan hubungan.

Guru dalam ruangan kelas cinta damai secara luas menggunakan metode pembelajaran kooperatif dan kontroversi akademik yang dikembangkan oleh David Johnson dan Roger Johnson. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Mereka memiliki kewajiban untuk mempelajari materi-materi yang diberikan dan memastikan bahwa anggota kelompok lainnya pun mempelajarinya. Metode kontroversi akademik digunakan ketika satu gagasan siswa, informasi, kesimpulan, teori-teori, dan pendapat saling bertentangan dengan yang lainnya dan keduanya mencari suatu kesepakatan.

Dalam ruangan kelas cinta damai, generasi muda belajar untuk berani bertanggung jawab atas tindakan mereka dan meningkatkan rasa kepedulian akan sesama dan lingkungannya. Ruang kelas cinta damai membangun kapasitas generasi muda untuk mengelola dan meresolusi konflik mereka sendiri dengan mempelajari:

- Memahami dan menganalisa masalah
- Memahami arti damai dan membuat kedamaian
- Mengenali peran persepsi dan bias
- Mengidentifikasi perasaan
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan eskalasi
- Mengendalikan diri dan perasaan lainnya dengan benar
- Meningkatkan keterampilan mendengar
- Mengidentifikasi kepentingan umum
- Menginspirasi banyak pilihan sesuai kepentingan
- Mengevaluasi konsekuensi pilihan yang berbeda
- Menciptakan kesepakatan menang-menang (*win-win solution*).

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa program sekolah cinta damai memadukan resolusi konflik kedalam operasi sekolah. Setiap anggota komunitas sekolah mempelajari dan menggunakan keterampilan dan konsep resolusi konflik. Suasana sekolah cinta damai merefleksikan kepedulian, kejujuran, kerjasaman, dan apresiasi terhadap keberagaman. Sebagai keseluruhan program seluruh-sekolah, konsep sekolah cinta damai menggabungkan:

- Lingkungan pembelajaran yang kooperatif
- Instruksi langsung dan praktek keterampilan resolusi konflik dan prosesnya
- Sistem pengelolaan sekolah dan kelas
- Perpaduan konsep dan keterampilan resolusi konflik kedalam kurikulum

Program sekolah cinta damai ini menantang generasi muda dan dewasa untuk yakin bahwa dengan tanpa kekerasan, tujuan realistis yang diinginkan adalah keragaman masyarakat. Nilai dan keragaman mendorong sekolah cinta damai untuk meningkatkan penciptaan kedamaian sebagai perilaku normatif bagi orang dewasa dan para siswa. Sasaran dari penciptaan kedamaian adalah untuk tujuan pribadi, kelompok, dan iunstitusional dan untuk mempertahankan hubungan yang kooperatif.

Pendekatan sekolah cinta damai menggabungkan proses kurikulum, mediasi, dan pendekatan ruangan kelas cinta damai. Ruangan kelas cinta damai adalah unit dasar dari sekolah cinta damai karena di sinilah para siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk resolusi konflik secara kreatif dan dimana konflik yang utama itu

tertuju. Pendekatan sekolah cinta damai membantu komunitas sekolah dalam menunjukan elemen-elemen khusus yang akan mentransformasi sekolah. Elemen-elemen ini bukanlah rangkaian perkembangan melainkan langkah awal dalam mengawali program sekolah cinta damai. Sekolah cinta damai muncul ke dalam beberapa tahap, membuahkan hasil ketika semua transformasi sudah pada tempatnya. Elemen-elemen transformasi termasuk:

- Mendirikan pelatihan resolusi konflik untuk orang dewasa
- Mendesain ekspektasi dan sikap pengelolaan sistem dengan teori resolusi konflik
- Mengembangkan cakupan dan rangkaian keterampilan resolusi konflik yang diajarkan kepada siswa
- Menyediakan peluang bagi pemahaman masalah yang tepat dalam hal umur, pengertian, asal, kepentingan, sumber daya, nilai-nilai, pilihan untuk di tindak lanjuti, konsekuensi dari pilihan-pilihan, dan peluang-peluang – dan damai dan penciptaan kedamaian
- Menyediakan peluang untuk pemahaman sesuai usia bagi prinsip-prinsip resolusi konflik berdasarkan teori negosiasi integratif.
- Menyediakan peluang bagi setiap siswa untuk mempelajari dan berlatih strategi-strategi resolusi konflik dalam hal negosiasi dan pembuatan keputusan diruangan kelas
- Menyediakan peluang bagi para siswa untuk mengabdikan sebagai mediator di kelasnya masing-masing
- Menyediakan pelatihan mediasi
- Mengembangkan proses evaluasi untuk mencapai tujuan menjadi sekolah tanpa kekerasan.

Bodine dan Crawford (1996) juga mengemukakan tipikal akademik sekolah dan kebijakan praktik dan disiplin sering kontradiksi dengan resolusi konflik yang damai. Sekolah cinta damai telah meninjau dan memikirkan kembali operasi semacam ini. Kecuali operasi sistem yang menghubungkan perilaku yang diharapkan dengan sistem, pesan yang kontradiktif akan menghasilkan kebingungan dan harapan yang tidak jelas. Kebanyakan metode pengelolaan perilaku sekolah berdasarkan hukuman dibandingkan dengan disiplin. Program ini memperoleh kepatuhan siswa melalui penentuan ekspektasi eksternal yang diperkuat lewat pemaksaan. Tujuan dari sekolah cinta damai adalah untuk menciptakan

program kedisiplinan di seluruh sekolah yang berfokus pada penguasaan siswa dalam mengatur dan mengendalikan perilaku mereka.

Berdasarkan uraian di atas, kurikulum resolusi konflik di sekolah mencakup (1) pemahaman tentang konflik, (2) prinsip-prinsip resolusi konflik (pemecahan masalah berdasarkan *win-win solution*, (3) langkah-langkah dalam pemecahan masalah (misalnya, menyetujui untuk melakukan negosiasi dan menetapkan aturan dasar untuk negosiasi, mengumpulkan informasi tentang konflik, menjajaki opsi solusi yang mungkin, memilih opsi solusi, dan mencapai kesepakatan), dan (4) keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan setiap langkah-langkah efektif (misalnya, aktif mendengarkan, reframing, pemahaman, dan mengatasi dampak perbedaan budaya terhadap sengketa) (Filner dalam Bodine & Crawford, 1998:xv).

F. KESIMPULAN

Fenomena konflik sosial sebagaimana yang dipaparkan di atas sangat memprihatinkan karena seringkali konflik yang terjadi berujung pada kekerasan yang disebabkan masing-masing pihak yang berkonflik tidak memiliki keterampilan untuk mengatasi konflik atau menyelesaikan konflik dengan prinsip '*win-win solution*'. Mengingat eskalasi konflik tidak berkurang intensitasnya, maka warganegara perlu disiapkan agar memiliki karakter antara lain memiliki sikap untuk bersedia bekerja sama dan keterampilan menciptakan kerjasama yang harus dilatih dan dididik sejak dini. Keterampilan untuk bekerjasama ini perlu dimiliki oleh warganegara, sebab dalam kehidupan sosial dimana setiap orang berinteraksi dengan orang lain, bukan tidak mungkin akan terjadi konflik sehingga diperlukan suatu keterampilan untuk mengatasinya. Untuk itu kepada warganegara perlu diperkenalkan dengan pendidikan resolusi konflik, yaitu suatu merupakan program yang menawarkan proses resolusi konflik kepada semua anggota masyarakat khususnya komunitas sekolah untuk memecahkan masalah dalam program resolusi konflik. Pendidikan resolusi konflik merupakan program yang menawarkan proses resolusi konflik kepada semua anggota masyarakat, khususnya komunitas sekolah. Kesuksesan pendidikan resolusi konflik di sekolah bergantung pada suasana sosial sekolah. Persetujuan pembuatan kesepakatan perlu mengkarakterisasi tiap ruangan kelas, dan negosiasi digunakan setiap anggota komunitas sekolah untuk meresolusi konflik dengan adil.

G. REFERENSI

- Abdullah, I 2006. *Konstruksi dan reproduksi kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Blau, P.M. 1967. *Exchange and Power in Social Life*. New York: John Willey & Son.
- Bodine, R & Crawford, D 1996. *Conflik Resolution Education*. USA: A joint project of the US Department of Justice & the US Department of Education.
- 1998. *The Handbook of Conflict Resolution Education: A guide to Building Quality Programs in Schools*. San Francisco: NIDR National Institute For Dispute Resolution Jossey-Bass Publishers.
- Budimansyah, D 2009. *Membangun karakter bangsa di tengah arus globalisasi dan gerakan demokrasi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Sosiologi Kewarganegaraan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia 14 Mei 2009. Bandung: UPI
- Branson, M.S 1998. *The role of civic education*. Calabasas: CCE
- Coleman, J.S 1990. *Foundation of social theory*. Cambridge: MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Crawford & Lipschutz (ed.) *The Myth of ethnic conflict: Politics, economics, and cultural violence*. 1998. University of California at Berkeley: IAS International and Area Studies.
- Cohen, R. 1995. *Students Resolving Conflict*. Parsippany, New Jersey: Good Year Books
- Deutsch & Coleman (eds.) 2000. *the Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Grace, N, Rosaira, I & Prihadyanti, D. 2008. *Kajian peran modal sosial dalam interaksi antara perguruan tinggi-pemerintah-industri. Studi kasus UGM*. Jakarta: Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK LIPI.
- Johnson, D.P. 1986. *Teori Klasik dan Modern 2*. Diindonesiakan oleh Robert M.Z lawang. Jakarta: PT Gramedia
- Kimmel, P.R. 2000 "Culture and Conflict" in Deutsch & Coleman (eds.) *the Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Kleden, I 2008. *Menulis politik: Indonesia sebagai utopia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Lickona, T. 1992. *Educating for Character. How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York – Toronto – London – Sydney – Auckland: Bantam Books
- Maftuh, B 2008. *Pendidikan Resolusi Konflik*. Bandung: CV Yasindo Multi Aspek.
- 2010. *Memperkuat Peran IPS dalam Membelajarkan Keterampilan Sosial dan resolusi Konflik*. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru besar dalam bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Universitas pendidikan Indonesia.

- Rusnaini. 2009. 'Sistem nilai budaya dan integrasi sosial masyarakat Linggoasri' dalam jurnal *MIPS*, Vol . 8, No.1 Maret 2009.
- Ritzer, G & Goodman, D.J 2008. *Teori sosiologi modern*. Dialihbahasakan oleh Alimandan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setyanto dan Pulungan 2009. *Politik identitas: agama, etnisitas, dan ruang/space dalam dinamika politik di Indonesia dan Asia Tenggara*. Salatiga: Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik).
- Severin, W.J & Tankard, J.W. 2008. *Teori komunikasi: sejarah, metode dan terapan di dalam media massa*. Dialihbahasakan oleh Sugeng Hariyanto. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Winataputra, U.S 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. Disertasi. Tidak dipublikasikan. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winataputra U.S. 2006. 'Pendidikan guru untuk menunjang proses kolektif mencerdaskan kehidupan bangsa' dalam Budimansyah & Syam (ed) *Pendidikan nilai moral dalam dimensi pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Lab. PKn FPIPS- UPI

Undang-Undang

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Situs Internet:

cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/.../Polisi.Mediasi.UKI-YAI.diakses tanggal 21 Maret 2010.

dessynataliani.blogspot.com/2006. [Memutus Rantai Kekerasan Antar Pelajar \(Membanding Indonesia dan Belanda\)](#). Diakses tanggal 20 Maret 2010.

dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/category/ipdn
www.duniaesai.com/psikologi/psi8.html. **Perkelahian Pelajar** diakses tanggal 25 Maret 2010)

Sajad, A. 2009 - suarapembaca.detik.com/.../menyemai-tawuran-menuai-perdamaian. Diakses tanggal 20 Maret 2010

Kolopaking, L.M dkk 2006. *Jejaring sosial dan resolusi konflik masyarakat pedesaan*
Tersedia di
<http://web.ipb.ac.id/lppm/ID/index.php?view=penelitian/hasilcari&status=buka&id-haslit=PD/008.06/KOL/j>. Diakses tanggal 11 November 2009.

